

DETERMINAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Aprilia Saputri⁽¹⁾, Yesi Mutia Basri⁽²⁾, Mudrika Alamsyah Hasan⁽³⁾

^(1,2,3)Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

*email korespondensi: yesimutia@gmail.com

Abstrak.

Penelitian ini memiliki tujuan menganalisa kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, pemanfaatan teknologi informasi, dan ketaatan peraturan perundangan pada sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Pekanbaru. Populasi pada penelitian ini yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam Pemerintah Kota Pekanbaru. Sebanyak 99 responden berpartisipasi dalam penelitian ini yang diperoleh dengan memakai metode purposive sampling. Teknik pengumpulan data memakai kuesioner. Metode analisis yang dipakai pada penelitian ini adalah regresi linear berganda menggunakan SPSS versi 25 memperlihatkan kalau kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi dan ketaatan peraturan perundangan berdampak kepada sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan sistem pelaporan tidak berdampak kepada sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Kata kunci: Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Ketaatan Peraturan Perundangan.

Abstract.

This study has the aim to analyzing the determination of clarity of budget targets, accounting controls, reporting systems, accounting control, utilization of information technology, and compliance with laws and regulations on the performance accountability system of Pekanbaru City government agencies. The population in this study is Regional Apparatus Organizations (OPD) in Pekanbaru City Government. A total of 99 respondents participated in this study obtained by using purposive sampling method. Data collection techniques using a questionnaire. The analytical method used in this study is multiple linear regression using SPSS version 25 showing that the clarity of budget targets, accounting control, utilization of information technology and compliance with laws and regulations have an impact on the performance accountability system of government agencies. Meanwhile, the reporting system has no impact on the performance accountability system of government agencies.

Keywords: Clarity of budget goals, Accounting control, Reporting system, utilization of information technology, Compliance with laws and regulations.

PENDAHULUAN

Pada saat ini mewujudkan good governance pada pemerintah telah menjadi suatu keharusan. Salah satu usaha untuk menciptakan good governance tersebut yakni penerapan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada penyelenggaraan pemerintah. Good governance dipercayai bisa merubah keadaan pemerintahan yang masih kurang pada pemberian pelayanan yang bersih dan baik dari praktek nepotisme,

kolusi, dan korupsi. Dalam hal ini pemerintah sudah menentukan kebijakan dalam menerapkan sistem pertanggung-jawaban yang efektif, teratur, dan jelas yang dikatakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

SAKIP bisa bermanfaat agar dapat menghitung tiap pembangunan atau kinerja yang dilaksanakan tiap-tiap satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Juga, sistem ini dapat pula menjadi sebagai patokan dalam

mempertanggung jawabkan anggaran yang sudah dipakai sebagai pembangunan daerah

Menurut Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota dan Kabupaten di Indonesia Tahun 2021 menunjukkan nilai rata-rata yang meningkat. Rata-rata nilai SAKIP dalam lembaga/kementerian mengalami peningkatan 71,30 dari 70,75, dalam pemerintah provinsi jadi 70,88 dari 70,02, dan dalam pemerintah kota/kabupaten jadi 61,60 dari 60,68. Sedangkan pada RB, rata-rata nilai nasional mengalami peningkatan dengan rincian 75,65 dari 74,93 pada lembaga/kementerian, 65,63 dari 64,28 pada pemerintah provinsi, dan 54,44 dari 53,85 pada pemerintah kota/kabupaten. (PANRB,2022). Namun pada beberapa daerah nilai SAKIP masih belum memuaskan (Menpan.go.id, 2022).

Pada lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru berdasar Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Pekanbaru 2018 memperoleh nilai 54% (CC) sedangkan pada tahun 2019 mengalami sedikit peningkatan yaitu dengan nilai 58% (CC). Pada tahun 2020 Kota Pekanbaru mendapatkan nilai 67% (B) dan pada tahun 2021 memperoleh nilai 68% (B). Hal ini menunjukkan Pemerintah Kota Pekanbaru hingga sekarang masih disebut tidak bisa memberikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahnya dengan predikat yang membuat puas. Kinerja sejumlah OPD masih berjalan lambat karena predikat B pada SAKIP 2021 masih jauh dari harapan.

Banyak faktor yang memberi pengaruh sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di antaranya yakni kejelasan sasaran anggaran. Menetapkan tujuan spesifik bisa lebih produktif, yang bisa memacu karyawan agar dapat melaksanakan yang paling baik dalam meraih tujuan yang

di harapkan membuat berpengaruh dalam meningkatnya kinerja (Emile,2004). Sejalan dengan penelitian (Isnanto, 2019) (Wahyuni, 2014) (Alawia et al., 2021) kalau kejelasan sasaran anggaran memiliki pengaruh positif kepada akuntabilitas kinerja. Tetapi berbeda dengan penelitian yang dilaksanakan (Pratama, 2019) menyatakan kalau kejelasan sasaran anggaran tidak berdampak kepada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Faktor kedua adalah pengendalian akuntansi. Pada penelitian (Setiawan, 2013) menyebutkan kalau pengendalian akuntansi berdampak kepada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini memperlihatkan kalau makin besar kepedulian dan keterlibatan pimpinan, dan pemangku kepentingan pada penyusunan akuntabilitas kinerja, sehingga makin tinggi juga akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Menurut (Mulyadi et al., 2018) dan (Fathia, 2017) mengatakan kalau pada pengendalian akuntansi, rencana atau standar tindakan telah ditetapkan agar dapat menghitung efektivitas melaksanakan aktivitas. Pengendalian wajib dibuat berkembang untuk membuat keputusan yang direncanakan bisa dibuat agar meraih tujuan yang sudah ditentukan untuk organisasi. Namun, penelitian yang dilaksanakan (Wahyuni, 2014) mengatakan kalau pengendalian akuntansi tidak berdampak kepada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Faktor ketiga yaitu sistem pelaporan. Penelitian (Isnanto, 2019) mengatakan Sistem pelaporan akuntabilitas kinerja selaras dengan peraturan, pencantuman indikator target kinerja yang SMART (*“specific, measurable, aggregable, realistic, dan time-bound”*) amat memberi pengaruh akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Yang bisa berakibat positif atas keberhasilan sebuah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Selaras dengan penelitian yang dilaksanakan (Mulyadi et al., 2018) dan (Pebrianti & Aziza, 2019)

sistem pelaporan yang baik dibutuhkan supaya bisa melakukan pemantauan dan melakukan pengendalian kinerja manajerial untuk menerapkan anggaran yang sudah ditentukan. Namun, penelitian yang dilaksanakan (Heptariani.Z et al., 2013) mengatakan kalau sistem pelaporan tidak berakibat kepada akuntabilitas kinerja.

Faktor keempat yaitu pemanfaatan teknologi informasi. Dengan aplikasi teknologi informasi instansi bisa terjadi berubahnya sistem pelaporan, manajemen dan pelayanan, dari tradisional ke modern. Penelitian yang dilaksanakan (Rakhma, 2021) (Razi, 2017) mengatakan kalau memanfaatkan teknologi informasi berdampak kepada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Yang artinya kalau aparat pemerintah yang memakai teknologi informasi bisa menghasilkan mutu pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Tapi beda dengan penelitian yang dilaksanakan (Putri, 2015) memberi kesimpulan kalau pemanfaatan teknologi informasi tidak berdampak pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Faktor kelima adalah ketaatan peraturan perundangan. Pada penelitian yang dilaksanakan (Haryani, 2021) mengatakan kalau ketaatan peraturan perundangan berdampak kepada sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Yang membuktikan kalau saat melaksanakan kewajiban dan tugas sejalan dengan aturan yang ada untuk tercapainya pemerintah yang akuntabilitas. Sejalan dengan penelitian yang dilaksanakan (Dariana, 2020) menunjukkan kalau adanya ketaatan peraturan perundangan berdampak kepada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Yang bertentangan dengan penelitian yang dilaksanakan (Carolina, 2019) mengatakan kalau peraturan perundangan tidak berdampak kepada sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penelitian ini mengembangkan penelitian (Widaryanti, 2020) yang meneliti kejelasan target anggaran, sistem pelaporan, dan pengendalian akuntansi kepada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Semarang. Dalam penelitian ini peneliti menambah variabel pemanfaatan teknologi informasi dan ketaatan peraturan perundangan. Alasan peneliti menambah variabel tersebut karena saat ini makin meningkat teknologi informasi terutama dibidang akuntansi supaya bisa memberi peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta akuntabilitas tidak akan terlaksana efisien tanpa ada transparansi dan peraturan hukum yang jelas, membuat mengembangkan akuntabilitas diperlukan sebuah aturan dan mekanisme yang jelas.

Dari uraian diatas penelitian ini memiliki tujuan agar dapat menganalisa determinasi kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, pemanfaatan teknologi informasi, dan ketaatan peraturan pemerintah terhadap sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada OPD Pemerintah Kota Pekanbaru.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Stewardship

Davis & Donaldson (1991) menyatakan teori stewardship yaitu teori yang menjelaskan keadaan ketika para manajer tidak mendapat motivasi dari tujuan-tujuan perorangan tetapi lebih diperlihatkan kepada target hasil utama mereka sebagai kepentingan organisasi, mengakibatkan teori itu punya landasan sosiologi juga psikologi yang telah di konsep dimana eksekutif sebagai steward termotivasi agar berperilaku sejalan dengan yang diharapkan client. Sementara, tindakan steward tidak dapat menjauhi organisasinya, itu disebabkan steward berusaha mencapai target yang telah ditetapkan organisasi. Pada *Stewardship Theory, model of man* ini didasari dari

pelayanan yang mempunyai tindakan yangmana dia bisa di bentuk supaya terus bisa di ajak kerjasama pada organisasi, mempunyai tindakan kolektif atau kelompok dengan utilitas tinggi dibanding individunya dan terus siap dalam memberikan pelayanan.

Teori stewardship mencerminkan kaitan yang kuat diantara kinerja organisasi dan suksesnya organisasi, membuat fungsi organisasi itu dapat maksimum. Perkiraan paling penting dari stewardship yaitu steward membuat lurus tujuan organisasi menurut tujuan principal. Steward akan bertindak sejalan dengan kepentingan dan kesepakatan bersama.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pada “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014” menyatakan kalau “sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah”.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yakni kewajiban sebuah instansi pemerintah supaya bisa bertanggungjawab pada misi organisasi untuk meraih tujuan dan target yang sudah ditetapkan melewati sistem pertanggung- jawaban dengan cara periodik (Pratama, 2019).

Kejelasan Sasaran Anggaran

Emile (2004) pada (Pratama, 2019) mengatakan kejelasan sasaran anggaran yaitu sampai mana tujuan anggaran di tetapkan dengan spesifik dan jelas supaya anggaran itu di mengerti pihak yang bertanggungjawab kepada pencapaian sasaran anggaran itu. Penetapan tujuan spesifik dapat lebih produktif, yang bisa memacu karyawan agar melaksanakan yang terbaik untuk meraih tujuan yang diinginkan

agar berpengaruh terhadap meningkatnya kinerja.

Keterlibatan individu bisa mengerti target yang ingin diraih, juga seperti apa meraihnya dengan memakai sumber daya yang tersedia, selanjutnya sasaran-sasaran anggaran yang di susun bisa sejalan dengan apa yang ingin diraih. Dengan target anggaran yang jelas, mudah dalam menghitung gagalnya atau berhasilnya melaksanakan tugas organisasi untuk meraih target dan tujuan yang sudah ditentukan. Ada sasaran anggaran jelas bisa memberikan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang disebabkan kejelasan sasaran anggaran dapat menolong pegawai agar dapat meraih kinerja yang di inginkan, yangmana dengan melihat target anggaran yang jelas, taraf kinerja bisa diraih (Widaryanti, 2020).

Pengendalian Akuntansi

Pengendalian yaitu sebuah rencana perilaku atau standar dalam menghitung kinerja pelaksanaan. Agar dapat meraih tujuan yang sudah ditentukan untuk organisasi, pengendalian wajib di kembangkan agar keputusan yang direncanakan bisa dibuat. Pengendalian internal yaitu perangkat kebijakan dan prosedur agar dapat membuat perlindungan kekayaan ataupun aset perusahaan pada semua rupa perilaku penyalahgunaan, memberi jaminan ketersediaan informasi akuntansi perusahaan yang tepat, juga memberi kepastian kalau seluruh ketetapan (peraturan) undang-undang/hukum juga kebijakan manajemen sudah di patuhi atau dilaksanakan seperti apa seharusnya bagi karyawan perusahaan (Hery, 2014;11).

Pengendalian akuntansi dilaksanakan agar dapat memeriksa prosedur monitoring, sistem pencatatan transaksi, dan sistem perencanaan yang didasari dalam sistem informasi. Kegunaan inti dari informasi akuntansi yaitu mengendalikan. Informasi akuntansi yaitu alat pengendali penting untuk organisasi sebab akuntansi menyediakan informasi yang memiliki sifat

kuantitatif. Informasi akuntansi sering diwujudkan dengan rupa ukuran finansial, maka memberi kemungkinan agar dapat dilaksanakan integrasi informasi dari seluruh unit organisasi yang akan membuat cerminan kinerja organisasi keseluruhan.

Sistem Pelaporan

Bastian (2010:297) mengatakan pelaporan kinerja yaitu cerminan kewajiban agar dapat menjabarkan dan melaporkan kinerja seluruh kegiatan juga sumber daya yang wajib di pertanggungjawabkan. Pelaporan ini yaitu bentuk dari proses akuntabilitas kinerja. Pelaporan kinerja bermaksud agar dapat menyampaikan raihan kinerja instansi pemerintah selama satu tahun anggaran yang dihubungkan dengan proses peraihan tujuan dan target instansi pemerintah. Laporan keuangan di lingkungan sektor publik memegang peranan penting untuk membuat akuntabilitas sektor publik. Informasi keuangan yang ada pada laporan keuangan ini jadi asas untuk proses mengambil ketentuan. Pelaporan keuangan yaitu sarana dalam melakukan akuntabilitas publik yang efisien, bukan tujuan akhir dari akuntabilitas sektor publik.

Pemanfaatan Teknologi Informas

Teknologi informasi yaitu semua metode atau sarana yang terintegrasi yang dipakai dalam menjangkau data, mengelolah dan mengirim atau memberikan dengan cara elektronik menjadi informasi dengan bermacam bentuk yang memiliki manfaat untuk penggunaanya dalam menciptakan ketentuan yang lebih efisien dan informatif (Susilo, 2016).

Pada pemanfaatan teknologi informasi dilingkungan pemerintah bisa pula membuat optimal kinerja dari satu unit ke unit yang lain, maka dengan ada teknologi informasi staff yang melakukan tugas bisa bekerja dengan terintegrasi dalam membuat mudah akses diantara unit kerja.

Ketaatan Peraturan Perundangan

Bastian (2010:33) mengatakan ketaatan dalam peraturan perundangan yaitu rasa patuh seseorang untuk taat pada peraturan yang sudah di bentuk lembaga Negara atau pejabat yang mempunyai wewenang dan memiliki kekuatan pengikat untuk membuat aturan dan membuat tertib seluruh kehidupan bangsa dan negara. Berdasar ketentuan Lembaga Administrasi Negara Tahun 2003, kalau melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah wajib didasari sebuah sistem yang bisa memberi jaminan pemakaian sumber-sumber daya dengan konsistem memakai aturan perundangan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang di pakai di penelitian ini yaitu metode penelitian kuantitatif. Populasi pada penelitian ini yakni Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekanbaru yang ditentukan dengan teknik *purposive sampling*. Responden pada penelitian ini adalah Sekretaris Daerah, Inspektorat, Dinas dan Badan. Teknik mengumpulkan data pada penelitian ini memakai kuesioner dengan menyebarkan langsung kepada OPD Pemerintah Kota Pekanbaru. Responden pada penelitian ini yaitu Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Perencanaan, dan Kepala Sub Bagian Keuangan dari 33 OPD Kota Pekanbaru. Metode analisis yang dipakai pada penelitian ini adalah regresi linear berganda menggunakan SPSS versi 25.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah mengumpulkan data dengan menyebarkan kuesioner, berikut adalah beberapa tes yang dilakukan:

Tabel 1. Karakteristik Responden

Keterangan	Presentase
Jenis kelamin	
Laki-laki	54%
Perempuan	46%
Umur	
22-29 Tahun	15%
30-37 Tahun	31%
38-45 Tahun	44%
46-53 Tahun	10%
>54 Tahun	-
Pendidikan Terakhir	
D3	7%
S1	67%
S2	26%
S3	-
Lama Bekerja	
1-3 Tahun	29%
4-6 Tahun	38%
7-9 Tahun	17%
>10 Tahun	16%

Sumber: Data olahan, 2022

A. Uji Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif memberikan gambaran sebuah data yang diketahui dari standar deviasi, nilai rata-rata (mean), maksimum, minimum (Ghozali, 2013).

Tabel 2. Statistik Deskriptif

variabel	N	Min	Max	Mean	Std.Dev
SAKIP(Y)	99	34	50	42.17	4.028
KSA (X1)	99	26	40	33.03	3.105
PA (X2)	99	30	45	38.39	3.057
SP (X3)	99	19	25	21.27	1.665
PTI (X4)	99	18	25	21.69	1.988
KPP (X5)	99	19	30	24.91	2.987
Valid N (listwise)	99				

Sumber: Data Olahan, 2022

Dari hasil statistik deskriptif dapat terlihat bahwa variabel sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah mempunyai nilai minimum total jawaban responden adalah 34, nilai maximum total jawaban responden adalah 50, nilai rata-rata jawaban responden adalah 42,17 dan memperoleh standar deviasinya 4,028 yang menunjukkan sebaran data yang tidak terlalu besar, karena standar deviasinya lebih kecil dari nilai rata-rata.

B. Uji Kualitas Data

Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas dipakai dalam menghitung valid/sah atau tidak sebuah kuesioner.

Tabel 3. Uji Validitas

Variabel	r-hitung	r-tabel	Cronbach Alpha
SAKIP	0.591-0.695	0.197	0.841
KSA	0.499-0.712	0.197	0.779
PA	0.291-0.658	0.197	0.710
SP	0.488-0.582	0.197	0.787
PTI	0.603-0.770	0.197	0.734
KPP	0.748-0.838	0.197	0.886

Sumber: Data Olahan, 2022

Tabel 3 menunjukkan hasil validitas untuk variabel yang terkait. Menunjukkan kalau seluruh nilai r-hitung lebih besar dari semua nilai r-tabel, yang berarti bahwa semua item pernyataan pada indikator atau kuesioner dapat digunakan sebagai alat ukur variabel. Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa koefisien cronbach alpha lebih tinggi dari 0,6 maka bisa ditarik simpulan kalau semua instrument dalam penelitian ini adalah reliable.

C. Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Persamaan regresi linear berganda dari model penelitian menjadi sebagai berikut dengan menggunakan analisis variabel dalam penelitian untuk mengukur pengaruh atau tidaknya:

$$Y = 2.654 + 0.296X_1 + 0.345X_2 + 0.023X_3 + 0.370X_4 + 0.321X_5 + e$$

Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized coefficients		Std. Coefficients Beta	T	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	2.654	4.684		0.567	0.572
KSA (X1)	0.296	0.134	0.228	2.205	0.030
PA (X2)	0.345	0.117	0.262	2.956	0.004
SP (X3)	0.023	0.188	0.009	0.120	0.905

PTI (X4)	0.370	0.175	0.183	2.11 9	0.037
KPP (X5)	0.321	0.135	0.238	2.38 0	0.019

Sumber: Olahan Data, 2022

D. Pengujian Hipotesis

Pengujian Hipotesis Pertama (H1)

Didapati bahwa nilai t-hitung 2,205 > 1,985 t-tabel dengan nilai P-Value sebesar 0,030 < 0,05. Berdasar hasil uji itu, maka ada ketetapan yaitu H_1 diterima dan H_0 ditolak, ini menunjukkan kalau kejelasan sasaran anggaran memiliki pengaruh kepada sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Pekanbaru.

Diterimanya hipotesis ini memperlihatkan kalau dengan sasaran anggaran yang jelas bisa membuat mudah dalam bertanggungjawab pada kegagalan atau keberhasilan melaksanakan tugas organisasi dalam meraih target juga tujuan yang telah di tentukan sebelumnya. Dengan demikian diharap dengan berdasar teori stewardship pengembangan keadaan manajer mendapat motivasi sasaran hasil utama kepentingan organisasi tidak mendapat motivasi dari kepentingan pribadi, jika kedua belah pihak mempunyai tujuan yang sama maka steward akan berperilaku seperti keinginan principal. Sehingga diharap dengan ada kejelasan sasaran anggaran bisa melihat apa anggaran telah sejalan rencana kerja dan anggaran OPD.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Isnanto, 2019), (Budiani, 2021), dan (Widaryanti, 2020) yang menyatakan kalau dengan sasaran anggaran yang jelas bisa menaikkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Namun beda dengan penelitian yang dilaksanakan (Wahid, 2016) yang mengatakan kalau kejelasan sasaran anggaran tidak mempunyai dampak kepada sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pengujian Hipotesis Kedua (H2)

Diperoleh kalau nilai t hitung 2,956 > 1,985 (t tabel) dengan nilai P-Value sebesar

0,004 < 0,05. Berdasar hasil uji itu, maka ada ketetapan yaitu H_2 diterima dan H_0 ditolak, ini menunjukkan kalau pengendalian akuntansi mempunyai dampak kepada sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Pekanbaru.

Makin baik pengendalian akuntansi maka bisa membuat mudah pengawasan dan perencanaan, yang bisa sebagai pengendalian keseluruhan yang dipakai dalam mengukur, memotivasi, dan memberi sanksi perilaku karyawan dan manajer dari sebuah organisasi. Teori stewardship menjelaskan bahwa sifat individu bisa berlaku jujur pada pihak lainnya, dapat dipercaya, serta memiliki integritas. Dalam suatu pemerintahan, yangmana pemerintah bertanggungjawab memantau kegiatan yang dilaksanakan dan akan menciptakan sebuah laporan keuangan yang bermutu, karenanya pemerintah melakukan pengendalian dengan cara mengontrol semua kegiatan juga memberi kepastian kalau seluruh undang-undang atau ketetapan hukum dan kebijakan manajemen sudah dilaksanakan seperti seharusnya.

Hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian (Pratama, 2019), (Harianto et al., 2021), dan (Carolina, 2019) yang menyatakan kalau makin baik pengendalian akuntansi yang dilaksanakan pemerintah maka makin baik taraf ekonomi, efisien yang dilaksanakan pemerintah pada masyarakat. Namun beda dengan peneltian yang dilaksanakan (Budiani, 2021) yang mengatakan kalau pengendalian akuntansi tidak mempunyai dampak kepada sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pengujian Hipotesis Ketiga (H3)

Diperoleh kalau nilai t-hitung 1,120 < 1,985 t-tabel dengan nilai P-Value sebesar 0,905 > 0,05. Berdasar hasil uji tersebut, sehingga ada ketetapan yaitu H_3 ditolak dan H_0 diterima, ini memperlihatkan kalau sistem pelaporan tidak mempunyai dampak kepada sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Hasil penelitian yang tidak signifikan ini mungkin dikarenakan ada keadaan dimana pemerintah tidak bisa mengoptimalkan sistem pelaporan yang ada agar dapat memberi perkembangan akuntabilitas kinerja jadi lebih baik. Yang memperlihatkan kalau meski di OPD Pemerintah Kota Pekanbaru sudah ada sistem pelaporan, namun mereka belum memberi cerminan atas penerapan pemakaian anggaran yang sudah ditentukan. Membuat pemerintah tidak bisa melakukan penerapan dan pemanfaatan hasil dari laporan itu dengan optimal sebagai pengambilan keputusan politik, sosial, dan ekonomi dari pihak yang memiliki kepentingan.

Hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian (Setiawan, 2013) dan (Septiyani et al., 2020) mengatakan kalau sistem pelaporan tidak memiliki pengaruh kepada sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Namun beda dengan penelitian yang dilaksanakan (Harianto et al., 2021) yang mengatakan kalau sistem pelaporan mempunyai dampak kepada sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pengujian Hipotesis Empat (H4)

Diperoleh kalau nilai t-hitung $2,119 > 1,985$ t-tabel dengan nilai P-Value sebesar $0,037 < 0,05$. Bedasar hasil uji itu, sehingga ada ketetapan yaitu H_0 ditolak dan H_4 diterima, ini menunjukkan kalau memanfaatkan teknologi informasi memiliki pengaruh pada sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Pekanbaru.

Berdasarkan teori stewardship maka pemerintah dituntut untuk memberikan pelayanan bagi kepentingan instansi dan masyarakat. Memanfaatkan teknologi informasi memudahkan kinerja para pegawai pemerintah untuk menjalankan tugas sebagai pelayan publik, dan dengan teknologi informasi sehingga pelayanan yang diberikan pada masyarakat bisa makin akurat dan cepat.

Hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian (Razi, 2017) dan (Rakhma, 2021) menunjukkan kalau hal yang penting dari memanfaatkan teknologi informasi jadi salah satu faktor pada usaha meningkatkan kinerja termasuk dilingkungan pemerintah. Namun berbeda dengan penelitian (Putri, 2015) yang mengatakan kalau memanfaatkan teknologi informasi tidak mempunyai dampak kepada sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pengujian Hipotesis Kelima (H5)

Diperoleh kalau nilai t-hitung $2,380 > 1,985$ t-tabel dengan nilai P-Value sebesar $0,019 < 0,05$. Berdasar hasil uji itu, sehingga ada ketetapan yaitu H_0 ditolak dan H_5 di terima, ini memperlihatkan kalau ketaatan aturan perundangan mempunyai dampak kepada sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Pekanbaru.

Dengan teori stewardship, steward bisa mendapat motivasi dalam tujuan organisasi dan berperilaku agar pihak yang memiliki kepentingan puas. Aturan perundangan bisa menjadi dasar untuk melaksanakan kegiatan pelayanan masyarakat. Pelaksanaan akuntabilitas kinerja tidak lepas dari dukungan perundangan-undangan yang mencukupi dan taat dalam sebuah kelembagaan misalnya perbaikan laporan akuntabilitas. Sehingga, ketaatan dalam aturan perundangan-undangan jadi penimbang atas berhasilnya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian (Dariana, 2020) dan (Haryani, 2021) yang mengatakan kalau ketaatan dalam peraturan perundangan bisa memacu lancarnya program-program yang dibuat pemerintah membuat teraihnya tujuan atau target yang diinginkan. Tetapi beda dengan penelitian yang dilaksanakan (Carolina, 2019) yang mengatakan kalau ketaatan peraturan perundangan tidak memiliki pengaruh kepada sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

E.Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)**Tabel 5.** Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R. Square	Adjusted R.Square	Std Error of the Estimate
1	.735 ^a	.541	.516	2.802

Sumber: Olahan Data, 2022

Berdasar tabel diatas bisa di lihat kalau koefisien determinasi sebanyak 0,541 atau 54,1% dengan demikian bisa di simpulkan kalau 54,1% variabel sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah bisa dijabarkan oleh kelima variabel independen, sedangkan 45,9% diberi pengaruh variabel yang lain yang tidak di amati pada penelitian ini.

KESIMPULAN

Dari penelitian ini bisa disimpulkan kalau ketaatan peraturan perundangan, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian akuntansi, dan kejelasan sasaran anggaran mempunyai dampak positif kepada sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Pekanbaru, namun sistem pelaporan mempunyai dampak negatif kepada sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Pekanbaru. Yang memperlihatkan kalau meski OPD Pemerintah Kota Pekanbaru sudah ada sistem pelaporan, namun mereka belum memberi cerminan atau penerapan pemakaian anggaran yang sudah ditetapkan. Membuat pemerintah tidak bisa melakukan penerapan dan pemanfaatan hasil dari laporan itu dengan optimal agar dapat mengambil ketetapan ekonomi.

Karenanya implikasi dari penelitian ini yaitu pemerintah bisa menetapkan kebijakan dalam menerapkan sistem pertanggung jawaban yang teratur dan jelas serta efisien dalam membuat peningkatan kinerja instansi pemerintah. Seluruh aktivitas organisasi wajib bisa dihitung dan disampaikan hubungannya dengan peraihan

tujuan organisasi dimasa mendatang. Perhitungan taraf berhasilnya sebuah organisasi dengan rupa mekanisme evaluasi, sehingga bisa dilihat kinerja sebuah organisasi. Penelitian berikutnya diharap memakai lokasi dan sampel yang beda supaya hasil penelitian bisa diperbandingkan dengan penelitian terdahulu. Juga diharap penelitian selanjutnya bisa memakai sampel lebih besar supaya bisa memberi hasil dan penggambaran penelitian yang lebih baik dan bisa di generalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alawia, M. T., Rahman, A. F., & Prastiwi, A. (2021). The effect of budgetary goal clarity and budget evaluation on performance accountability of local government. *International Journal of Research in Business and Social Science* (2147- 4478), 10(4), 520–524. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v10i4.1241>
- Budiani, L. V. (2021). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Kualitas Sumber Daya Manusia, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(2), 1–20.
- Carolina, S. (2019). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Ketaatan Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada OPD Di Indragiri Hilir). *JOM Fekon*, 6(1), 1–15.
- Dariana. (2020). Pengaruh Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Aparatur Pemerintah Dan Ketaatan Peraturan Perundangan Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Good Governance) Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten

- Bengkalis. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4(1), 124–139.
<https://doi.org/10.46367/jas.v4i1.224>
- Fathia, N. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan Kinerja dan Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). *JOM Fekon*, 4(1), 670.
- Harianto, D., Kennedy, & Zarefar, A. (2021). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Akip) (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir). *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 6(1), 122–139.
<https://doi.org/10.29303/jaa.v6i1.111>
- Haryani, S. (2021). Determinan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah : Studi Pada Pemerintah Kota Pekanbaru. *CURRENT: Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini*, 2(1), 78–93.
<https://doi.org/10.31258/jc.2.1.78-93>
- Heptariani, Z. S., Rasuli, M., & Taufik, T. (2013). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Budaya Organisasi, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja (Studi Empiris Pada Universitas Riau). *Sorot*, 8(1), 32.
<https://doi.org/10.31258/sorot.8.1.2349>
- Isnanto, Y. (2019). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 15(2), 13.
<https://doi.org/10.32663/jaz.v2i2.989>
- Mulyadi, Syamsidar, & Efendy, D. (2018). Pengaruh Sistem Pelaporan dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Pemerintah Aceh). *Jurnal Riset Inspirasi Manajemen Dan Kewirausahaan*, 2(2), 95–101.
<https://doi.org/10.35130/jrimk.v2i2.21>
- Pebrianti, S., & Aziza, N. (2019). *Effect of Clarity of Budget Objectives, Accounting Control, Reporting Systems, Compliance with Regulation on Performance Accountability of Government Agencies*. 292, 396–410.
<https://doi.org/10.2991/agc-18.2019.62>
- Pratama, R. (2019). Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(2), 429–444.
<https://doi.org/10.34152/fe.15.2.477-492>
- Putri, E. M. N. (2015). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). *JOM Fekon*, 2(1), 294–308.
- Rakhma, S. Y. (2021). ... , Sistem Pengendalian Internal, Kejelasan Sasaran Anggaran, Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja. *Jurnal Ilmu Dan ...*, 10.
<http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/4133>
- Razi, R. F. (2017). Pengaruh Ketaatan terhadap Peraturan Perundangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Akuntansi dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

- JOM Fekon*, 4(1), 1268–1281.
- Septiyani, G., Taufik, T., & Julita, J. (2020). Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah : Apakah dipengaruhi Kompetensi Aparatur, Teknologi Informasi, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan? *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini*, 1(2), 183–200.
- Setiawan, E. (2013). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. *Paper Knowledge . T*, 1–14.
- Wahid, I. (2016). Effect of Clarity of Budget Targets, Accounting Control, Competence of Local Government Apparatuses, Reporting Systems, and Compliance with Legislative Regulations on Accountability of Government Institution Performance (Empirical Study of Agam District W. *Online Journal of Economics Faculty Students*, 3(1).
- Wahyuni. (2014). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. 148(32), 148–162.
- Widaryanti. (2020). Analisis Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Fokus Ekonomi : Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 15(2), 477–492.
<https://doi.org/10.34152/fe.15.2.477-492>

